

Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik

Oleh:
Mochtar Pabottingi

Abstract

For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerning the serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed—a grim fact that has indeed affected the morale of the nation. Indonesia has become a leaderless country. Unfortunately, no one tries to unravel the serious dearth. At close examination, we find layers of wrong political practices that has over time undermined the normal recruitment process. This paper traces the layers from the very beginning of the New Order to the present stage of the Reform Efforts, including negligence in political science theories. The politics of depoliticization, the systemic nipping of the buds of leadership, the absence of regime change in the true sense of the word, the hampering of the initiative for a transitional constitution, the insincerity of initiative toward truth and reconciliation commission, the eruption of horizontal conflicts, the practice of impunity, and introduction of anachronistic politics, if in reverse manner, along the New Order and in the current Era of Reform Efforts—all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantly compromising ethical standards. These were eight roots that have made leadership doomed. Above all, however, the leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down of the concern for nation and/or nationhood, especially the severity of corruption among so-called “people’s representative” and with the flagrant abuse of regional autonomy. The greater the political collectivity is slighted and confused with forces of petty irrationalities and/or primordialism, the more numerous the distortions of leadership become. The author maintains that only a conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership, i.e., by the inculcation of the respectability of politics and of political profession, by sharpening of the understanding of our nation’s blue print and by heeding the imperative of nation in democracy, by separating the business of state from that of religion and/or primordial concern, and by making room for transitional rulings in the next constitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions of the transitional period as well as the anachronistic policies.

If democracy is to survive it will have to employ and use every bit of skill and knowledge and leadership it can get hold of. This complicated interdependent world in which we are living cannot be run without knowledge and skill, foresight and leadership. (A.D. Lindsay)

Eksis boleh dikata tanpa kepemimpinan, begitulah negara-nasion kita ditakdirkan sepanjang 1998–2008. Era Upaya Reformasi (EUR).¹ Segelintir figur yang di awal EUR prospektif menjadi pemimpin nasional ternyata mudah tertekuk menjadi kompromistis, kehilangan elan reformasi, berpikir jangka

pendek, dan dengan demikian mengikis sendiri prospeknya. Hingga saat ini sudah tak terhitung himbauan di media massa yang mencanangkan kerinduan bangsa kita akan kepemimpinan. Sayang, tak ada yang menyimak akar-akar lakuna atau ketiadaan pemimpin ini—dalam teori maupun praksis—sehingga kita pun tak kunjung tahu jalan menuju kondisi yang memungkinkan kelahirannya.

¹ Sengaja saya tidak menggunakan istilah “Era Reformasi” demi obyektivitas dan kerendah-hatian. Menyebut masa transisi politik seperti yang kita alami dalam periode 1998–2008 sebagai sudah “Era Reformasi” secara implisit menafikan dua kemungkinan. Pertama, bisa saja nanti dinyatakan secara terbuka bahwa upaya reformasi yang telah dilakukan sepanjang periode ini sesungguhnya masih lancung dan tak mewakili reformasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Kedua, jika kemungkinan pertama tadi benar, kita niscaya masih memerlukan upaya reformasi atau demokratisasi, baik sebagai koreksi parsial maupun sebagai koreksi komprehensif,

pada kesempatan lain. Sepanjang kata “reformasi” kita seartikan dengan “demokratisasi,” kita perlu mengakui bahwa langkah-langkah perubahan politik selama lebih sepuluh tahun terakhir untuk melaksanakannya barulah sampai pada apa yang bisa disebut “mixed performance” —kinerja yang belum menentu: baik dalam hitungan kedaulatan rakyat maupun perbaikan dalam hal peri kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya.

Pada hari-hari ini, tatkala kita memperingati Sepuluh Tahun Upaya Reformasi (1998–2008) dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional (1908–2008), jika kita hanya mampu menunjukkan posisi teoretis yang semestinya dan kemudian menyimak faset-faset evolusi politik nyata di Tanah Air yang mengerdikan peluang bagi kelahiran kepemimpinan dalam arti luas, baru kita bisa memaknai kedua peringatan ini sebagaimana mestinya. Lebih penting lagi, hanya dengan itu kita bisa membukakan jalan bagi solusi politik yang sehat dan rasional untuk mengatasi penderitaan yang masih terus beruntun mendera mayoritas bangsa kita.

Tulisan ini bertujuan untuk menegaskan tesis bahwa minimnya kepemimpinan di sepanjang EUR berkaitan langsung dengan tiadanya kristalisasi politik terutama lantaran begitu miskinnya niat baik, kejujuran, dan ketercerahan dalam berpolitik dan/atau berdemokrasi. Keadaan ini berkorelasi langsung dengan diterapkannya berturut-turut dua kebijakan politik anakronistik yang berbalikan satu sama lain, yaitu pertama di sepanjang 1971–1998 Orde Baru di bawah Soeharto dan kedua di sepanjang sepuluh tahun terakhir era pasca-Soeharto.

Korpus Teori Demokrasi Minus Kajian Kepemimpinan

Mengaitkan lakuna kepemimpinan di tengah-tengah *opacity* atau kekisruhan kondisi politik di EUR niscaya akan berhadapan dengan kesulitan literatur dalam dua hitungan. Pertama, sebagaimana telah diungkap oleh Giovanni Sartori dalam karya besarnya, pada korpus teori politik modern tak terdapat kajian tersendiri mengenai kaitan antara demokrasi dan kepemimpinan.² Kedua, jauh melampaui kurangnya kajian mengenai kaitan antara demokrasi dan kepemimpinan adalah kajian tentang perkembangan upaya demokratisasi dalam kondisi anomali dan/atau kondisi politik darurat yang senantiasa sarat perangkap, penyimpangan, kebingungan, dan/atau irasionalitas.

² Lihat Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revisited* (Part One: The Contemporary Debate), (Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987).

³ *Ibid.*, hlm. 164.

Sartori mengutip serangkaian pemikir politik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga ke zaman modern, seperti Thucydides, Lord J. Bryce, Karl Mannheim, S. de Madariaga, V.O. Key, dan Daniel Bell. Mereka semua bersaksi tentang *pentingnya menekankan kepemimpinan dalam demokrasi*. Akan tetapi, menurutnya, semua kesaksian yang sungguh benar itu hingga kini tak memperoleh pengindahan dalam korpus teori politik modern.

*If one looks into the theory of democracy in general, it can hardly be said that the message conveyed by the above quotations has been incorporated in terms of theoretical status; the praise of leadership remains a sideline of little theoretical consequence. And this quite apart from the anti-elitist attack.*³

Kita dapat memahami mengapa pengabaian tersebut demikian dirisaukan terutama oleh Sartori, sebab memang dialah pemikir politik yang mungkin paling kuat dan konsisten menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang berkualitas. Jika mayoritas teoretikus demokrasi modern menggeluti “dimensi horisontal” serta “teori deskriptif” dari dan atas demokrasi, Sartori mengerahkan energi intelektual terbaiknya pada “dimensi vertikal” serta “teori preskriptif” dari dan atas demokrasi.⁴ Baru belakangan ini, teoretikus seperti Larry Diamond mulai menekankan pentingnya “demokrasi yang bermutu”.⁵ Secara eksplisit Diamond mengakui pentingnya gagasan-gagasan kritis Sartori tentang demokrasi.

*On the more theoretical level of the definition of democracy and the debate surrounding its concepts, relationships, and forms, a stream of stimulating new work is appearing, of which the two recent two-volume contribution of Giovanni Sartori should be considered an essential reference.*⁶

⁴ *Ibid.*, *passim*.

⁵ Lihat Larry Diamond dan Leonardo Morlino, “The Quality of Democracy: An Overview”, *Journal of Democracy*, volume 15, number 4, October 2004.

⁶ Lihat Larry Diamond, Juan J. Linz, dan Seymour Martin Lipset, Eds., *Democracy in Developing Countries*, (Volume Two: Africa), (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1988), hlm. x.

Miskinnya kajian mengenai keterkaitan inheren antara demokrasi dan kepemimpinan antara lain disebabkan oleh dominannya para pendukung dari apa yang saya sebut “kubu prosedural”, seperti Joseph Schumpeter dan Samuel Huntington ketimbang “kubu esensial” di kalangan teoritis demokrasi maupun pada sebagian besar studi lapangan yang dilakukan tentang demokrasi; katakanlah hingga tahun 1970-an.⁷

Dominannya “kubu prosedural” mungkin sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa memang lebih gampang melakukan penelitian mengenai indikator-indikator demokrasi yang mudah dikuantifikasikan dan diterjemahkan ke dalam angka-angka statistik dibanding dengan indikator-indikator bersifat kualitatif yang tak bisa diperlakukan demikian. Kubu esensial memerlukan konsistensi ketajaman analisis secara lintas ilmu-ilmu sosial dari awal hingga akhir penelitian.

Faktor kepemimpinan jelas termasuk dalam ranah “esensial” itu. Seperti akan kami utarakan di bawah, Tocqueville sendiri dalam karya klasiknya, *Democracy in America*, boleh dikatakan tiada henti melecehkan peluang kepemimpinan dalam alam demokrasi.

Literatur politik modern yang didominasi oleh para pemikir dan/atau teoretikus “Barat” lebih miskin lagi dalam hal analisis tentang upaya demokratisasi dalam kondisi politik anomali dan/atau dalam keadaan *de facto* darurat yang juga menyulitkan kelahiran pemimpin. Kata “anomali” dipakai untuk menunjukkan kondisi politik yang umumnya resisten, baik terhadap semangat maupun terhadap kiat-kiat atau lembaga-lembaga demokrasi sebagaimana itu semua dipahami di Barat. Lantaran demokrasi mula-mula berkembang dan kemudian menjadi matang di Barat, maka kaidah-kaidah dan pemahaman demokrasi di dan dari Barat itulah yang kemudian dipandang sebagai “yang normal” atau “yang standar.”

Lakuna teoretis ini diperburuk oleh praktik yang sama-sama tak tercerahkan, baik dari sisi para pemikir demokrasi di Barat maupun dari

padanannya di kalangan bangsa kita. Tiga hal yang harus disebut: dasar-dasar teori politik modern, terutama teori demokrasi, lahir, dan berkembang terus di Barat. Hingga saat ini kita di Indonesia, seperti juga rekan-rekan kita dari negara-negara berkembang mantan koloni lainnya, hanyalah konsumen dari karya-karya mereka.⁸ Celakanya, pada umumnya kita tak menyadari bahwa—berdasarkan diktum “sosiologi ilmu pengetahuan”—pemahaman manusia atas suatu masalah pada umumnya sangat ditentukan oleh lingkungan sosio-historis dan/atau sosio-kultural tempatnya tumbuh dan berakar.

Dengan pemahaman demikian, kita mestinya berani menyatakan bahwa evolusi atau historisitas politik kita bukan hanya berbeda dari evolusi dan historisitas politik “Barat”, melainkan cenderung bertentangan semata-mata karena adanya pertandingan global antarbangsa sepanjang sejarah untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi politik. Dinamika kolonialisme yang membandingkan rumpun negara penjajah-umumnya di Barat dengan rumpun negara terjajah di Dunia Ketiga hampir selalu melahirkan keadaan *zero-sum*.

Oleh karena itu, harus ditekankan bahwa bersamaan dengan timbulnya ketimpangan yang besar antara negara-negara maju di Barat dengan negara-negara Dunia Ketiga, dalam hal evolusi ekonomi, antara keduanya juga terjadi ketimpangan besar dalam hal evolusi politik. Konsisten dengan tesis *zero-sum* di atas akan lebih jelas jika dikatakan bahwa sebagian besar kemajuan ekonomi di negara-negara maju dibayar telak dengan stagnasi dan kekerdilan kemajuan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga.⁹ Begitu juga halnya dalam hitungan evolusi politik. Kesenambungan otoriterisme di negara-negara Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil kerja sistemik tak patut yang terus dilakukan justru oleh negara-negara demokrasi maju.

Kenyataan getir tentang keterkaitan *zero-sum* dan bersimpingannya kemajuan ekonomi/politik antara kedua belahan peradaban umat manusia ini pada umumnya didiamkan oleh kalangan ilmuwan dan akademisi di Barat.

⁸ Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini, lihat misalnya Bhikhu Parekh, “The Cultural Particularity of Liberal Democracy”, dalam David Held, Ed., *Prospects for Democracy*, (Stanford, California: Stanford University Press, 1993).

⁹ Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini, lihat misalnya Bhikhu Parekh, “The Cultural Particularity of Liberal Democracy”, dalam David Held, Ed., *Prospects for Democracy*, (Stanford, California: Stanford University Press, 1993).

⁷ Lihat Mochtar Pabottingi, “Pengukur Demokrasi Kita”, yang ditulis sebagai “Pangantar” bagi Syamsuddin Haris, Ed., *Partai dan Parlemen Lokal: Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPi Press, 2007).

Mereka, misalnya terus menggunakan kaidah-kaidah politik modern yang tumbuh dan berkembang di Barat untuk mengukur evolusi politik di Dunia Ketiga, dengan asumsi bahwa mereka pemilik otoritas tunggal untuk melahirkan tesis-tesis politik. Sebagian besar dari keduapuluh tujuh indikator modal sosio-politik yang dikemukakan oleh Samuel Huntington misalnya lahir dari pengalaman sosio-historis Barat—butir-butir klaim yang dikukuhkan ketika Barat sudah maju.¹⁰ Dinafikan bahwa rangkaian kaidah/tesis politik mereka sama-sekali tak lepas dari kenyataan sosio-historis ilmu pengetahuan tadi.

Para teoretikus ekonomi/politik Baratlah yang kemudian melahirkan istilah-istilah, seperti “*developing economies*” atau “*developing democracies*” seakan-akan tak terdapat jurang lebar dan tak ada rantai besi yang melilit kondisi pemilik “*developing economies*” maupun “*developing democracies*” tersebut. Dengan kata lain, mereka—sengaja atau tidak—menghindari keadaan *zero-sum* yang mengikat kedua belah peradaban tersebut. Seolah-olah sengaja melupakan bahwa kecuali negara-negara satelit mereka, “*developed economies*” maupun “*developed democracies*” secara sistemik bekerja untuk membuat kehidupan ekonomi dan kehidupan politik, pada rumpun negara Dunia Ketiga pada umumnya, senantiasa berada dalam cekikan atau kontrol mereka.

Kondisi politik anomali, sebagian besar terjadi lantaran kolonialisme dan imperialisme Barat—terutama Eropa Barat dan kemudian juga Amerika Serikat dengan neo-kolonialisme dan neo-imperialismenya—mendistorsikan serta merampas peluang bagi berlangsungnya evolusi politik yang sehat-normal, di semua negeri jajahan atau “protektorat” mereka. Selain itu, dengan model “partisi” dan “unifikasi” yang mereka terapkan menjelang berakhirnya masa penjajahan langsung, negara-negara kolonial itupun menciptakan “bom waktu” yang hingga kini masih terus melahirkan kekisruhan politik di pelbagai bagian dunia.

Model partisi dan unifikasi tersebut memang dirancang oleh para mantan negara kolonis Barat untuk merampas peluang ‘mantan negara-negara koloni’ mereka untuk bisa tumbuh dalam evolusi politik yang normal dan sehat seperti yang mereka

sendiri nikmati. Jelas tujuan utamanya adalah untuk tetap menguasai, mengungguli, dan mengontrol mereka demi mempertahankan hegemoni politik dan ekonomi mereka secara global.¹¹ Salah satu yang paling terpukul dengan rekayasa partisi dan/atau unifikasi ini adalah negara-negara yang dulu merupakan bagian dari Kemaharajaan Turki Osmaniah, yang umumnya merupakan negeri-negeri mayoritas Muslim di Timur Tengah.

Kata “*de facto*” sengaja kita tekankan atas dasar kenyataan bahwa di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara mantan koloni, kondisi anomali dan/atau keadaan darurat itu pada umumnya tidak diakui atau tidak diumumkan secara eksplisit. Kekaburan batas-batas antara “kondisi darurat” dengan “kondisi normal” ini merupakan salah satu penyebab utama dari panjangnya kiprah irasionalitas politik di negeri kita. Penyebabnya antara lain adalah ketidakpercayaan timbal-balik antara pemerintah dan parlemen. Miriam Budiardjo mencatat bahwa pemerintah kurang memercayai kemampuan parlemen membuat UU Darurat, sedangkan parlemen kerap mencurigai motif pemerintah dalam kehendak untuk menerapkannya. Penyebab lain adalah sifat labilitas, dadakan, dan ketakterkontrolan dari rangkaian perkembangan politik itu sendiri lantaran lemahnya lembaga-lembaga pemerintahan kita.¹²

Semua itu jelas mempersulit bekerjanya kaidah-kaidah atau norma-norma politik yang mantap. Dan tanpa itu, negara dan/atau masyarakat tak akan memiliki tolok-tolok ukur yang diperlukan untuk melihat, menilai, dan mengakui kepemimpinan.

Dalam kondisi resmi atau *de facto* darurat kondisi politik, posisi-posisi politik maupun arah perkembangan politik Dunia Ketiga, terutama yang mantan koloni, sulit untuk dibaca. Besar dan dalamnya distorsi politik yang dilakukan oleh negara-negara kolonial atas negeri-negeri jajahan

¹⁰ Lihat Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 37-38.

¹¹ Untuk referensi mengenai kolonialisme Barat, lihat antara lain: Albert Memmi, *The Colonizer and the Colonized*, (New York: The Orion Press, 1965); K.M. Panikkar, *Asia and Western Dominance*, (New York: Collier Books Edition, 1969); Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, (New York: Grove Press Inc., 1968); Chinweizu, *The West and the Rest of Us*, (New York: Random House, 1975). Untuk neo-kolonialisme dan/atau neo-imperialisme, lihat misalnya: Chalmers Johnson, *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire*, (New York: An Owl Book, Henry Holt and Company, 2000).

¹² Lihat Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 274-275.

mereka, membuat rasionalitas politik sangat sulit tumbuh. Contoh dari keadaan ini bertebaran di negara-negara Asia, termasuk di Timur Tengah, di Amerika Latin, dan terutama di negara-negara Afrika. Di sini kehidupan politik ditandai oleh divergensi dan fragmentasi sehingga mekanisme politik tidak sejalan dengan bangunan politik yang hendak dibangun. Dalam hal ini, penolakan Bung Karno terhadap demokrasi Barat, misalnya, jelas mengandung sisi-sisi kebenarannya juga. Pada hakikatnya, bangunan politik yang hendak dibangun di negara-negara mantan koloni ini pun sudah rapuh sejak awal. Dalam pengamatan Larry Diamond,

*This includes the whole range of phenomena: establishment, breakdown, reequilibration, and consolidation of democratic government; periods of democratic persistence, crises, authoritarianism, and renewal; and all of the ambivalences and oscillations in between.*¹³

Kenyataan tentang divergensi evolusi politik serta posisi *zero-sum* dalam hal penguasaan sumber-sumber daya politik dan ekonomi inilah yang hingga kini masih belum memperoleh perhatian semestinya dari para ilmuwan politik, baik di kalangan negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang itu sendiri. Pada umumnya, kajian demokrasi di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang dilakukan secara terpisah dan sendiri, dengan demikian menafikan kenyataan divergensi atau *zero-sum* tadi.

Sehubungan dengan keadaan anomali dan kondisi *de facto* darurat di atas, yang paling terpengaruh dan terpukul adalah peluang dan potensi yang sehat bagi nasion untuk tumbuh dan berkembang. Lantaran banyaknya distorsi dan/atau rekayasa penjajahan, pelbagai perangkat politik, distorsi, irasionalitas, dan kebingungan melemahkan pertumbuhan dari apa yang saya sebut otosentrisitas pada nasion. Saya merumuskan nasion sebagai “kolektivitas politik yang egaliter-otosentris.” Tesis tentang adanya simbiosis inheren antara nasion dan demokrasi

lahir dari sini.¹⁴ Seperti akan kita lihat di bawah, pemimpin dan/atau kepemimpinan tak mungkin dilepaskan dari konteks nasion dan demokrasi, terutama dengan moda kerja otosentrisitas tadi.

Akar-Akar Lakuna Pemimpin dalam Praksis di Indonesia

Lakuna pemimpin di Tanah Air dalam sepuluh tahun terakhir punya sembilan sebab/preseden. *Pertama*, karena sepanjang 1971–1997 Presiden Soeharto terus membabati segenap pemimpin tandingan, mengebiri partai-partai yang selama lebih dari empat dekade, yaitu dari 1920-an hingga 1960-an, menjadi motor dinamika politik bangsa, dan menghabisi ruang semai bagi tunas-tunas pemimpin masa depan. Tindakan demikian menunjukkan tiadanya kenegarawanan dan kecerdasan politik. Saat *lengser*, Soeharto memang telah sempurna membuat Indonesia bangkrut pemimpin. Dan tak terperikan dampak negatif bagi negara maupun masyarakat yang diakibatkan oleh pembangkrutan tersebut.

Kedua, stigmatisasi atas kegiatan politik terbuka dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang monolitik. Depolitisasi ini dilancarkan dengan dalih bahwa kegiatan politik di luar kalangan penguasa hanya menyuburkan pertikaian dan tak memberikan kontribusi positif apapun. Bangsa kita dibuat lupa pada pelajaran yang tak ternilai, yaitu bahwa justru melalui perjuangan politik yang luaslah kita bisa merebut, menjaga, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai bentuk pembodohan politik tertinggi, depolitisasi menutup peluang bagi proses politik normal yang memungkinkan lahirnya pemimpin.¹⁵

Ketiga ialah karena sedari awal EUR tidak mengalami pergantian personalia Rezim Orde Baru. Ikut berjubah reformasi, sehingga para

Jakarta 25-27 Januari 1994: “Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosentrisitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia,” Orasi Ilmiah, Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama, PPW-LIPI, 22 Juni 2000; dan “In the Absence of Autocentricity: The Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesia,” dalam R. William Liddle, Ed., *Crafting Indonesian Democracy*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2001).

¹⁵ “Seluruh sistem dan pranata sosial, politik, dan kenegaraan sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketaksediaannya meneruskan pemerintahannya.” Lihat Stanley “Timbunan Sampah Orde Baru”, dalam Stanley, Ed., *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablaskan Rezim Soeharto di Era Reformasi*, (Jakarta: Institut Studi Arus Reformasi, Universitas Melbourne, Ausaid, 2005), hlm xv Uhlin menulis bahwa, “Menyusul naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan, seluruh oposisi hancur.” Lihat Anders Uhlin, *Oposisi Berserak*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1997), hlm 89.

¹³ Lihat Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset, Eds., *Democracy in Developing Countries: Africa: Volume Two*.

¹⁴ Untuk telaah-telaah teoretis awal mengenai kaitan antara nasion dan demokrasi dan sentralitas konsep “otosentrisitas” di dalamnya, lihat Mochtar Pabottingi, “Demokrasi: Masalah Genealogi, Distorsi, dan Otosentrisitas.” Seminar Nasional XI dan Kongres III AIPI

komponen atau penerus Orde Baru tetap memegang kendali bukan hanya atas jalannya pemerintahan, melainkan juga atas jalannya reformasi.¹⁶ Di bawah dominasi dan diktasi mereka dalam pemerintahan serta kepertaian, berlanjut pula penyebaran motif atau perilaku buruk mereka seperti keserakahan, ketidakpedulian pada baik bangsa maupun nasyon, dan di atas semuanya, terjadilah perampasan kedaulatan rakyat. Semua praktik tersebut sudah berurat-berakar di dalam jaringan kekuasaan Orde Baru. Di bawah dominasi dan diktasi itu pula terciptalah rekrutmen atau cetakan-cetakan baru ke dalam jajaran mereka.

Keempat, dijegalnya inisiatif Konstitusi Transisional juga lantaran dominasi/diktasi tadi. Tiap negara yang mengalami transisi politik dari otoriterisme ke demokrasi perlu melakukan periode sela, di mana Pemerintahan Transisional dan Konstitusi Transisional diperkenalkan demi membuka selebar-lebarnya peluang bagi koreksi atas beragam bentuk kerusakan akibat otoritarianisme sebelumnya dan sekaligus menutup peluangnya untuk terus menganggangi kekuasaan atau membajak upaya reformasi.¹⁷ Akan tetapi, seperti yang kita saksikan dalam sepuluh tahun terakhir, bagi para penerus Orde Baru, mempertahankan kekuasaan jauh lebih penting daripada menyelamatkan Indonesia.

Kelima, tiadanya ketulusan untuk menegakkan rekonsiliasi sejati sejak awal EUR. Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika didahului oleh penegakan kebenaran. Pada hakikatnya, rumus yang menyatu-paketkan kebenaran dan rekonsiliasi, seperti dilakukan pada pertengahan 1990-an di Afrika Selatan merupakan kunci

menuju kristalisasi politik. Kiat itu lahir dari rasionalitas politik universal, bukan milik eksklusif pemerintahan Nelson Mandela, yaitu bahwa rangkaian kekejaman dan/atau ketidakadilan sistemik yang berlaku sebelumnya pada suatu negara itulah yang harus dikoreksi juga secara sistemik.¹⁸

Keenam ialah dibiarkannya atau diperparahnya konflik horisontal, politisasi agama, dan pembodohan politik secara serempak di sejumlah daerah pada tahun-tahun awal EUR, baik oleh pemerintah maupun oleh unsur-unsur militer di daerah yang diperkirakan masih berkibrah dengan paradigma Orde Baru. Di sini dalam situasi lapangan yang serba kaotik dan sarat kebengisan seperti yang berlaku di Sanggau Ledo, Sampit, Ambon, dan Poso, misalnya, berperanlah berbagai pelaku dengan motif-motif utamanya masing-masing.¹⁹ Akan tetapi, terlepas dari keragaman motif tersebut, rangkaian konflik horisontal itu turut menentukan terjegalnya dua agenda pokok reformasi, yaitu tuntutan pertanggungjawaban dari para pelaku mega-korupsi serta para pelanggar HAM sepanjang 1965–1998.

Ketujuh, berkaitan dengan butir keenam, adalah disistemikannya *kebijakan impunitas*. Terlepas dari terhambatnya upaya-upaya ke arah penuntutan pertanggungjawaban atas para pelanggar HAM serta para pelaku mega-korupsi lantaran konflik-konflik horisontal tadi, memang sangat terbaca adanya persekongkolan terselubung di kalangan lembaga-lembaga peradilan untuk tidak menjamah mereka. Kenyataan ini terutama terasa ketika tuntutan

¹⁶ Pernyataan tentang rangkaian pemerintahan pasca-Soeharto sebagai tak lebih dari "bablasan Orde Baru" pertama kali saya lontarkan dalam wawancara dengan Harian *Kompas* yang dimuat pada halaman 1, pada 14 Januari 2004. Pada beberapa kali kesempatan Vedi R. Hadiz juga menyampaikan hal yang sama

¹⁷ Konstitusi Transisional atau "Interim Constitution" dilaksanakan, misalnya, oleh Afrika Selatan dalam rangka menyusun suatu konstitusi yang benar-benar progresif dengan meninggalkan segala bentuk kebijakan pemerintahan *apartheid* yang diskriminatif dan monopolistik serta sepenuh-penuhnya menyantuni *segenap warganegara Afrika Selatan*. Keutamaan demokratisasi atau lebih tepat lagi konstitusi Afrika Selatan terletak terutama pada koreksinya yang telak dan sekaligus progresif atas politik *apartheid* dengan segenap dampak buruknya. Dengan penempatan dialektis demikian, konstitusi Afrika Selatan tidak mengacu pada "tradisionalisme konstitusi", melainkan sebaliknya: pada konstitusi dalam dimensi progresifnya. "For constitutions with a transformative dimension", tulis Sunstein, "constitutional traditionalism seems positively perverse. As I have emphasized, the South African constitution is not understood by reference to long-standing practices; instead its meaning is gathered from the effort to eliminate the apartheid legacy." Lihat Cass R. Sunstein, *Designing Democracy: What Constitutions Do?* (Oxford University Press, 2001), hlm. 78.

¹⁸ Pelajaran terbesar yang bisa kita timba dari pengalaman Afrika Selatan dan belum diutarakan di manapun adalah betapa eratnyanya kaitan antara "konstitusi transformatif" yang berhasil disusun oleh Mandela dan kawan-kawannya di African National Congress dengan kinerja positif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mereka bentuk.

¹⁹ Telah-telaah yang dihasilkan oleh P2P-LIPI berhasil memaparkan himpunan faktor-faktor kultural, institusional, dan struktural yang menyebabkan ledakan rangkaian konflik di daerah-daerah. Termasuk di dalam atau bertumpang-tindih dengan ketiga faktor induk tersebut adalah persoalan "segregasi demografi", deprivasi ekonomi, oportunisme aparat keamanan maupun aparat militer, "komersialisasi hutan", "rasisme kelembagaan", dan "euforia otonomi daerah". Lihat M. Hamdan Basyar, Ed., *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-Pola Alternatif Penyelesaiannya*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2003); Bayu Setiawan, Ed., *Konflik Poso: Perbedaan Intensitas Konflik dan Efektivitas Upaya Penyelesaiannya*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2004); Sri Yanuarti et al., *Problematika Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2006); Heru Cahyono, Ed., *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, (Jakarta: P2P-LIPI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2008).

menyangkut diri mantan Presiden Soeharto beserta keluarganya. Logika sederhana menyatakan bahwa jika penanggung jawab utama, praktis seluruh pelanggaran HAM besar serta korupsi masif sepanjang Orde Baru tidak bisa diadili apalagi para bawahannya. *Dampak terbesar dari tiadanya punitas adalah tiada atau lenyapnya greget krisis (sense of crisis) di kalangan para penguasa betapapun dalamnya keadaan multikrisis yang menimpa.* Tidak adanya greget krisis adalah salah satu manifestasi utama dari tiadanya kepemimpinan, sebab di tengah-tengah keadaan multikrisis yang terus mendera, kepemimpinan tak bisa lain haruslah bertolak dari greget krisis yang nyata.

Kedelapan, dan meliputi keenam butir di atas, yaitu diterapkannya kebijakan politik anakronistis dalam dua periode berturut-turut. Kebijakan anakronistis terjadi lantaran adanya kesenjangan antara asumsi/preskripsi politik dengan realitas politik. Soeharto menerapkan *format politik darurat* dari 1966 hingga 1998 padahal sejak 1975 kondisi negara-nasion kita sudah tak lagi darurat. Sebaliknya, sepanjang periode 1998–2008 rangkaian pemerintahan pasca-Soeharto menerapkan format politik normal, padahal sejak Juli 1996 negara kita sudah kembali memasuki dan kemudian terjebak dalam kondisi *de facto* darurat. Kentalnya kondisi anakronisme menjungkir-balikkan kaidah-kaidah rasionalitas politik dan otomatis menyulitkan pemimpin lahir.²⁰

Agak mencengangkan bahwa di Indonesia seolah-olah tak ada yang menyadari betapa berbahayanya anakronisme politik itu. Tiap rezim atau pemerintahan yang menerapkannya merisikokan kesia-siaan bagi seluruh kinerjanya. Untuk Demokrasi Terpimpin, misalnya, Bung Hatta sudah menyimpulkan sejak dini bahwa yang akhirnya akan dicapai Bung Karno tak lebih dari “bangunan kertas”. Untuk Orde Baru, yang dicapai Soeharto hanyalah timbunan hutang ratusan trilyun rupiah serta keterpurukan politik, ekonomi, hukum, dan moral yang parah dan

hingga kini para penguasa masih belum juga menemukan jalan keluar yang pasti. Itu semua membentuk akar tunjang dari multiplikasi penderitaan bangsa kita sepanjang sepuluh tahun EUR. Jasa-jasa baik yang dihasilkan oleh Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru menjadi lebur dan sia-sia berhadapan dengan mahabencana yang mereka ciptakan sendiri di penghujung masa pemerintahannya masing-masing.

Realitas kondisi darurat sepanjang sepuluh tahun terakhir terlihat nyata dalam bentuk keadaan serba terpuruk: sarat korupsi/penyelewengan, distorsi, oportunisme, dan riuhnya provokasi/konflik, kesewenangan, pemancingan di air keruh, serta bebasnya laku jahar atas aset-aset masyarakat/negara. Kita juga menyaksikan pembusukan hukum dan yang sangat penting disadari—terus berlakunya apa yang saya sebut “perangkap-perangkap simalakama”. Ini semua merupakan tumpukan kesalahan yang berhulu pada kebijakan politik anakronistis sebelumnya.

Para komponen Orde Baru yang terus mendominasi rangkaian pemerintahan pasca-Soeharto tentu sangat berkepentingan untuk menganggap situasi dan format politik anakronistis itu tak ada, sebab merekalah perancang, pelaku, dan sekaligus *profiteer* utamanya. Membuka kontradiksi antara asumsi/preskripsi politik mereka dan realitas politik yang dihadapi berarti membongkar muslihat politik mereka sendiri. Maka apa yang disebut dengan penuh kebanggaan oleh mantan Presiden Habibie sebagai “detik-detik yang menentukan” di awal masa pemerintahannya yang singkat sesungguhnya lebih jujur jika disebut “detik-detik yang ditentukan”.²¹ Di sini patut disayangkan bahwa, baik para pengamat politik apalagi para pimpinan pemerintahan sepanjang Orde Baru dan selama sepuluh tahun EUR tak pernah secara terbuka atau jujur mengakui, apalagi mempersoalkan “*blunder asumsi*” ini.

Imperatif “Nasion” dan “Kedaulatan Rakyat” Bagi Pemimpin

Di atas semuanya, penyebab paling dasar dari lakuna pemimpin adalah kenyataan bahwa mesin politik Orde Baru maupun EUR tidak

²⁰ Untuk anakronisme yang menerapkan *format politik darurat* dalam keadaan yang tak lagi darurat (1966–1998), lihat antara lain tulisan kolom, pengantar, dan artikel penulis “Anakronisme”, dalam Mochtar Pabottingi, *Suara Waktu*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm 10–13; “Pengantar” dan “Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis Politik dan Arah Pemecahannya”, dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, Eds., *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995). Untuk anakronisme yang menerapkan *format politik normal* dalam keadaan *de facto* darurat, lihat Mochtar Pabottingi, “UU No. 22 Tahun 1999: *Blunder* Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik”, dalam Syamsuddin Haris, Ed., *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPi Press, 2006). Lihat juga Mochtar Pabottingi, “Dalam Kutukan Anakronisme”, *Tempo*, 1 Agustus 2008.

²¹ Lihat B.J. Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan*, (THC Mandiri, 2006).

berkiprah pada poros nasion, melainkan pada eksklusivisme kekuasaan yang merampas kedaulatan rakyat. Lantaran lamanya pembodohan politik berlangsung, bangsa kita umumnya lupa bahwa sejak Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 pemimpin *ipso facto* hanya bisa tampil dan berkiprah dalam konteks kolektivitas politik tertinggi yang dimiliki oleh bangsa kita, yang tentu saja tak lain dari “nasion”. Sama halnya, sejak kedua momen penting itu demokrasi atau upaya reformasi akan sia-sia jika kedaulatan rakyat dirampas, terbuka maupun terselubung.

Kolektivitas nasion kita diinjak-injak sepanjang 1965–2008, dimulai dengan pembantaian ratusan ribu saudara sebangsa di awal Orde Baru. Sejak itu, *de facto* Republik Indonesia bukan lagi milik kita bersama, melainkan milik kekuasaan otoriter di bawah Presiden Soeharto. Dari situ, persekusi warganegara dan/atau pembantaian atas rakyat, termasuk untuk merampas lahan-lahan hidup mereka, terus berlanjut.

Konflik horisontal parah yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah juga harus dipahami sebagai akibat dari penginjak-injakan terhadap nasion –terhadap prinsip kebersamaan kita sebagai bangsa, yaitu ketika proses pembangunan sepanjang Orde Baru hanya menguntungkan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan organik dengan kelompok para penguasa sebagai kepanjangan figur-figur atau tangan-tangan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah dengan memarjinalkan masyarakat selebihnya. Pada keempat kasus itu dapat dikatakan bahwa terutama di daerah kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan “birokratisasi Islam politik” dimulai dari lingkaran dalam kekuasaan Presiden Soeharto, terutama melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Agaknya inilah yang disebut oleh Rosa Marieta “rasisme institusional”.

Dari kasus-kasus yang ditemukan, tampak bahwa ‘rasisme institusional’ memang bekerja di dalam kelembagaan pemerintahan lokal di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Hak-hak istimewa yang diterima kelompok Kristen pada masa kolonial Belanda dan di awal masa kemerdekaan, dan kemudian adanya pengambil-alihan kekuasaan oleh

kelompok Islam melalui rekayasa demografis dan ICMI-isasi.... di bawah pemerintahan Orde Baru merupakan bukti nyata dari bekerjanya ‘rasisme institusional’ melalui birokrasi pemerintah daerah.²²

Kenyataan ini diperkuat oleh Syamsuddin Haris ketika dia menulis bahwa, “faktor terpenting di balik konflik-konflik lokal tersebut adalah *persoalan ketidakadilan* akibat eksploitasi sumber daya alam lokal dan sentralisasi politik secara berlebihan oleh Jakarta ketimbang masalah loyalitas daerah terhadap ide persatuan.”²³

Kedaulatan rakyat kita sudah dirampas bahkan lebih awal lagi, yaitu sejak periode Demokrasi Terpimpin. Meskipun Rezim Orde Baru mengalihkan pemerintahan kita dari posisi “sangat kiri” ke posisi “sangat kanan”, monopoli kepemimpinan inilah yang diteruskan oleh Orde Baru dengan cara yang lebih ketat dan sistemik, terutama dengan mengangkat 60 persen anggota MPR dan “melitsus” selebihnya. Di era EUR, perampasan kedaulatan rakyat diteruskan dengan “sistem nomor urut”, peruakan politik uang, dan pelbagai muslihat yang memanfaatkan celah-celah penyelewengan yang sengaja diadakan dalam rangkaian undang-undang politik maupun peraturan pelaksanaannya.

Sepanjang Rezim Soeharto, semboyan “pembangunan nasional” terutama tunduk pada kepentingan negara-negara Barat yang menyeret Indonesia ke dalam timbunan hutang: menggelembung dari 3 milyar dolar di bawah kekuasaan Sukarno menjadi 155 milyar dolar AS di bawah Soeharto. Maka terjadilah apa yang paling dikuatirkan oleh Bung Karno: Indonesia kembali menjadi “bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa” justru di alam kemerdekaan. Agenda “pengkulian bangsa” tak terpisahkan dari agenda “pembangunan nasional” Orde Baru, yang memindahkan porsi/potensi ekonomi rakyat secara masif ke tangan keluarga dan para kroni Soeharto yang rata-rata merupakan “konglomerat hitam”.

²² Lihat Josephine Rosa Marieta, “Manajemen Konflik dan Keberagaman dalam Konteks Kembali *Negeri: Ohoi/Ratschap*,” dalam Sri Yanuarti *et al.*, *Problematika Capacity Building*, *op cit.*

²³ Lihat Syamsuddin Haris, “Dilema ‘Salah Urus’ Negara dan Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan”, dalam Firman Noor, Ed., *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordialisme di Indonesia*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2007), hlm. 100.

Sepanjang 1998–2008, langkah-langkah besar pengkulian dan pengkhianatan terhadap bangsa terus berlangsung, misalnya dalam kebijakan pertanian; dalam penggundulan hutan (lebih dari 100 juta hektar raib hanya dalam delapan tahun); dalam kebijakan pendidikan; dalam pengobralan *Indosat* serta pengontrakan tak wajar dari tambang-tambang kaya-raya kita; dalam kebijakan impor yang mematikan produktivitas rakyat, termasuk impor kondom bekas serta limbah perusak lingkungan; dan di atas semuanya itu, dalam penghibahan ratusan trilyun dana BLBI kepada bank-bank yang umumnya dimiliki oleh para “konglomerat hitam” tadi. Tak kurang khianatnya adalah kasus-kasus pembuatan undang-undang oleh DPR yang menafikan kepentingan nasion.²⁴

Pemimpin mustahil muncul di tengah-tengah meruaknya praktik yang melecehkan nasion, sebab secara ultimat kepemimpinan memang diukur dari curahan pengabdian dan perkiblatan kepada nasion. Di negara manapun kepemimpinan senantiasa bekerja dalam moda otosentrisitas dan dalam konteks nasion. Prinsip otosentrisitas pada hakikatnya sama dan sebangun dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat.” Pemimpin berkiprah subur dalam ukuran dan paradigma sistem politik serta kolektivitas politik yang otosentris itu. Sama seperti nasion adalah kolektivitas politik yang otosentris, demokrasi adalah sistem politik yang otosentris, yaitu bertujuan membawakan kesejahteraan bagi segenap warganya. Dalam konteks politik, saat kedaulatan rakyat (baca: demokrasi) dirampas, kepemimpinan akan tersendat. Hanya jika rakyat berdaulat, sistem ganjaran bagi tingkat-tingkat *integritas* dan *kompetensi* dari para aspiran pemimpin bisa diukur dan difungsikan dengan sebaik-baiknya.

Jika mekanisme pengabdian dan perkiblatan kepada nasion mampet, pemimpin akan kehilangan arah, wadah, dan tempat bernafas. Arah, wadah, dan tempat bernafas itulah yang ditiadakan selama 32 tahun oleh Orde Baru – peniadaan yang diteruskan oleh jajaran komponennya sepanjang sepuluh tahun terakhir. Antara nasion dan demokrasi terdapat simbiosis alamiah yang sangat kuat. Serat-serat nasion menguat dalam demokrasi, dan demokrasi tumbuh sehat dalam nasion. Apabila nasion

diinjak-injak, demokrasi pun bagai kerakap tumbuh di batu. Dan kepemimpinan dalam pengertian yang sesungguhnya mustahil tumbuh di situ.

Kaitan inheren antara kepemimpinan dengan nasion inilah yang luput dari tangkapan Tocqueville ketika dia –dengan bias aristokrasinya– menyatakan bahwa kepemimpinan tak punya tempat atau tak bisa berkiprah banyak dalam alam demokrasi. “Not only is confidence in the superior attainments of certain individuals weakened among democratic nations...,” tulis Tocqueville, “but the general notion of the intellectual superiority which any man whatsoever may acquire in relation to the rest of the community is soon overshadowed.”²⁵ Di sini Tocqueville memperluas kuasa prinsip “kesamaan suara” (*equality of vote*) hingga mencakup “kesamaan pengaruh” atau “kesamaan daya persuasi” yang takkan dibenarkan oleh nalar sederhana sekalipun.

Selain itu, argumen Tocqueville bertentangan dengan fakta-fakta dasar mengenai betapa Amerika Serikat terbentuk dari proses kontestasi dan seleksi kepemimpinan yang kecemerlangan gagasan-gagasannya, terutama dalam *The Federalist Papers* masih terus bersinar dan menjadi tolok ukur negara-negara demokrasi maju hingga saat ini.²⁶ Dia keliru ketika menyatakan bahwa kepemimpinan dalam sistem demokrasi di Amerika hanya berlaku dan memang sangat mengesankan saat proses pembentukan selama lima puluh tahun pertama negara federasi tersebut, sebab kian modern dan kian kompleks suatu peradaban yang harus dihadapi oleh tiap negara ke depan, maka kian dituntut pula kecerdasan dan kepeloporan untuk menghadapinya.

Perangkap-Perangkap Simalakama

Sebagai dampak negatif anakronisme politik, bangsa kita secara beruntun terus saja memasuki perangkap simalakama. Itu misalnya kita hadapi pada ketentuan konstitusional maupun perundangan yang meluangkan dua kali masa

²⁴ Untuk ilustrasi yang komprehensif tentang ini, lihat Mochtar Pabottingi, *Risiko Politik Divestasi Indosat*, (Jakarta: Guci Offset Printing, 2007).

²⁵ Lebih lanjut Tocqueville menulis, “As men grow more like each other, the doctrine of the equality of intellect infuses itself into their opinion, and it becomes more difficult for any innovator to acquire or to exert much influence over the minds of a people.” Lihat Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, vol. 2, hlm. 273.

²⁶ Lihat Clinton Rossiter, Ed., *The Federalist Papers: Hamilton, Madison, Jay*, (New York: A Mentor Book, 1961).

jabatan eksekutif tertinggi di pusat dan di daerah, yang sebetulnya berlaku dan diterima sebagai sesuatu yang sehat dan rasional di negara-negara demokrasi pada umumnya. Akan tetapi, diakui atau tidak pada tahun-tahun EUR ketentuan ini diamalkan secara sangat merugikan. Parahnya politik uang membuat para calon legislator, calon kepala daerah, apalagi calon presiden menumpuk hutang ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah sesuai dengan jenjang kepangkatan yang dituju. Maka kuat diperkirakan bahwa pada masa awal jabatan mereka; seorang legislator, kepala daerah, dan presiden sibuk mencari dana atau jalan dalam berbagai bentuk untuk membayar tumpukan hutang tersebut. Di samping itu, tentu saja mengumpulkan dana lagi untuk menghadapi pemilihan berikutnya. Dan jika terpilih untuk masa jabatan kedua, mereka tetap sibuk melakukan hal-hal yang sama –kali ini untuk memperkaya diri sendiri. Singkatnya, pada kedua masa jabatan itu mereka hanya sibuk menggerogoti negara dan tak ada kontribusi apa-apa bagi kehidupan rakyat pada umumnya.

Perangkap simalakama juga kita dapati dalam benturan antara keharusan mengacu pada kabinet presidensial menurut konstitusi, dan keniscayaan praktik kabinet parlementer menurut realitas. Ini jelas sangat mengisruhkan proses politik kita. Namun, kehendak untuk memaksakan konsistensi dalam pilihan kabinet presidensial mengandung bahaya tersendiri sebab kita tidak berada pada kondisi normal. Kita bisa saja terjebak pada pemberian privilese tak patut kepada partai-partai besar yang ada sekarang – partai-partai yang mayoritas merupakan penerus atau sudah terkontaminasi oleh rangkaian motif/perilaku buruk Orde Baru.

Tentu kita juga bisa salah membiarkan oportuniste partai-partai kecil menjamur. Namun, perlu disadari bahwa pada mulanya multiplikasi jumlah partai terjadi terutama bukan karena oportuniste para pendirinya, melainkan karena kebijakan depolitisasi puluhan tahun oleh mesin otoritarianisme Orde Baru di bawah Soeharto. Lebih penting lagi, mempersulit atau bahkan menutup kemungkinan munculnya partai-partai baru bisa berarti menghancurkan masa depan nasion kita sendiri. Siapa tahu masa depan Indonesia berada di tangan partai kecil yang baru akan lahir dan pada waktunya akan tumbuh menjadi partai raksasa dengan integritas dan kompetensi istimewa.

Perangkap simalakama juga berlaku luas dalam keniscayaan melaksanakan otonomi daerah serta demokratisasi di tengah lemahnya kapasitas pemerintah untuk menegakkan hukum dan akuntabilitas pemerintahan. Tidak melaksanakan demokratisasi dan otonomi daerah akan memperparah pembusukan hukum dan pemerintahan serta menghambat aspirasi yang sudah puluhan tahun terkekang. Akan tetapi, menegakkan demokratisasi dan otonomi daerah di tengah anakronisme dan patologi politik uang serta kepicikan tentang imperatif nasion juga menghasilkan dampak yang kurang-lebih sama. Politik uang yang patologis, langsung membajak upaya demokratisasi secara berbanding lurus dengan kadar gairah demokratisasi. Otonomi daerah apalagi “pemekaran daerah” yang dilaksanakan secara picik, terutama yang mengedepankan eksklusivisme agama/daerah, akan merusak serat-serat nasion serta menafikan kriteria integritas pribadi/nasional dan kompetensi profesional/nasional.²⁷

Kebajikan-Kebajikan Kristalisasi Politik

Tiap negara yang transisi politiknya berlangsung secara benar, maka akan berusaha sedapat mungkin mewujudkan *kristalisasi politik*. Nalarnya sederhana: personalia dan/atau perilaku rezim yang nyata telah melakukan kerusakan parah atas bangsa dan negara tak boleh dibiarkan terus berkuasa dan justru harus dimintai pertanggungjawabannya. Nalar itulah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di awal kebangkitannya, yang celaknya justru ia hempang sejak 21 Mei 1998.

Strategi yang menghendaki kebangkitan tanpa mengoreksi deretan *blunder* atau pengkhianatan masa lalu jelas bersifat menipu. Menjalankan roda Republik kita dengan mengobral impunitas adalah kekeliruan fatal. Itu mengaburkan pemisahan antara perilaku kekuasaan yang khianat/nista dan perilaku kekuasaan yang bakti/mulia serta membiarkan berlanjutnya dominasi para pelaku khianat/nista itu di dalam pemerintahan.

²⁷ Dalam Laporan Utamanya khusus mengenai “pemekaran wilayah” yang disebutnya “pemisahan wilayah”, *Tempo* menulis sebagai berikut: “Secara umum, indeks pembangunan manusia—metode untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu kawasan—di daerah baru masih di bawah daerah induknya. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, pembentukan daerah baru masih besar pasak daripada tiang.” Lihat, “Anarki Pemisahan Wilayah”, *Tempo*, 15 Februari 2009, hlm. 23.

Mesti disadari bahwa pemimpin, khususnya negarawan, hanya bisa lahir dari posisi-posisi politik yang jelas. Karakter bersinar di sepanjang proses kontestasi dan deliberasi—formal maupun informal—dari posisi-posisi politik yang dikukuhkan dan dipertanggung-jawabkan secara terbuka. Begitu pula emansipasi, pencerahan, atau terobosan politik. Pelembagaan oposisi yang kredibel pun dimungkinkan hanya dengan berlakunya kejelasan dalam posisi-posisi politik makro maupun dalam pelbagai masalah kenegaraan. Di sini posisi David Hume yang menyatakan bahwa “Reason is, and ought only to be, the slave of the passions” yang kurang lebih senada dengan penilaian Tocqueville tentang demokrasi Amerika setelah lewatnya masa “para pendirinya” memperoleh sanggahan yang sangat kuat dari posisi Juergen Habermas maupun John Rawls, dan paling mutakhir Ian Shapiro.²⁸

Tanpa kristalisasi politik, tanpa kejelasan posisi-posisi politik, oposisi yang kredibel akan mati dengan sendirinya, digantikan oleh merajalelanya korupsi dan oportunisme. Karakter dan prinsip-prinsip politik luhur jadi lumer dan menguap di gelanggang. Dan bersamaan menguap pulalah elan politik yang hendak menegakkan akuntabilitas, transparansi, pemerintahan bersih, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Ketiadaan kristalisasi politik ini membawa akibat yang amat serius dan menyedihkan. Seluruh tatanan politik, hukum, ekonomi, dan moralitas kita menjadi rawan distorsi, penyelewengan, dan tidak ada pertanggung-jawaban. Dalam konteks itulah nasion terus dikhianati secara telanjang, bahkan *bizarre*, justru oleh para petinggi yang berkewajiban menjaga dan memuliahkannya di ketiga cabang pemerintahan.

Jalan Menuju Kristalisasi Politik

Mengharapkan kebangkitan figur-figur pemimpin tanpa melaksanakan kristalisasi politik adalah ibarat mengharapkan pepohonan tumbuh subur tanpa sinar matahari. Di luar jalan “Kebenaran dan Rekonsiliasi” yang masih terus dijegal, kristalisasi politik tetap bisa dilaksanakan secara berarti oleh segenap komponen bangsa kita lewat enam langkah, tiga yang pertama menuntut internalisasi dan tiga lainnya menuntut praksis.

Pertama sekali ialah dengan kembali menangkap diktum Aristoteles tentang politik sebagai bidang kegiatan termulia karena jika dilaksanakan secara benar tak ada bidang lain yang bisa mengatasinya dalam menegakkan rangkaian kebajikan serta kemaslahatan publik (*public virtues and public goods*). Bagi Aristoteles, politik bukanlah sesuatu yang deskriptif, melainkan preskriptif. Secara eksplisit, dia mengaitkan pemahamannya tentang politik dengan risalahnya yang terkenal *Ethica Nichomachea*.²⁹ Kita perlu menghimbau tiap warganegara yang memiliki integritas dan kompetensi publik agar aktif dalam kerja politik, baik yang sifatnya mencerahkan maupun yang langsung terjun di lapangan. Pada hakikatnya, politik itu sendiri adalah ajang kepemimpinan. Dan tak ada sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kiprah dan/atau kontestasi politik seperti yang berlaku pada demokrasi.

Kedua, dengan kembali menajamkan pemahaman kita akan cetak biru atau rangkaian ideal makro-politik kita sebagai nasion. Kita perlu menelusuri sejarah proto-nasion dan sejarah pergerakan nasional kita agar bisa lebih jernih menangkap akar-akar historis dari jati diri kita sebagai bangsa. Dalam hitungan ini, menyimak

²⁸ “The Rawlsian idea of *reflective equilibrium* presupposes the possibility of moral deliberation. In Habermas, the *ideal speech situation* is intended to permit deliberations about ends as well as about means. Because each idea is embedded in a highly complex theory, one should should beware of discussing them independently of the context. Yet the arguments advanced by Habermas and Rawls do seem to have a common core: political choice, to be legitimate, must be the outcome of *deliberations about ends among free, equal, and rational agents*.” Lihat Kata Pengantar dari Jhon Elster, (Ed.), *Deliberative Democracy*. Cambridge University Press, hlm. 5 dan Ian Shapiro, *The Moral Foundations of Politics*, (New Haven: Yale University Press, 2003).

²⁹ Dalam suatu terjemahan mutakhir dari *Politics* karya Aristoteles, Phillips Simpson kembali menandakan bahwa *Politics* harus ditempatkan dalam konteks *Ethica Nichomachea*. Lihat Peter L. Phillips Simpson, *The Politics of Aristotle*, (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1997). Aristoteles sendiri menulis bahwa, “... the majority of the acts commanded by the law are those which are *prescribed* from the point of view of *virtue taken as a whole*; for the law bids us practise every virtue and forbids us to practise any vice.” Dan dia menambahkan bahwa “This is why we do not allow a man to rule, but *rational principle*, because a man behaves thus in his own interests and becomes a tyrant.” Lihat Richard McKeon, Ed. *Introduction to Aristotle*, (New York: The Modern Library, 1947), hlm. 402, 412. Dengan mudah kita bisa melacak perindukan gagasan-gagasan Rawls, Sartori, dan Shapiro pada gagasan-gagasan Aristoteles.

ulang korpus karya Bung Karno dan Bung Hatta merupakan suatu keniscayaan sebab pada kedua korpus karya mereka kita dapat menangkap genealogi nasion kita.³⁰ Pancasila harus kita pahami tidak melulu sebagai hasil adopsi dari khasanah pemikiran politik universal, melainkan juga sebagai hasil sublimasi dan kristalisasi prinsip-prinsip politik modern dari partikularitas rangkaian pengalaman/ideal kita sebagai bangsa. Pancasila lahir dari alam pikiran Indonesia modern, bukan dari khasanah leluhur kita ribuan tahun lampau.

Adalah imperatif untuk tidak memahami atau menggunakan Pancasila sepenggal-sepenggal di luar keutuhan kohesifnya, apalagi mengoperasionalkan salah satu silanya dalam politik praktis yang melecehkan sila-sila lainnya. Dulu Orde Baru melakukan ini dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia) sedemikian rupa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya secara bengis sehingga praktis menginjak-injak sila kedua, keempat, dan kelima. Akibatnya, ideal dan sendi-sendai persatuan itu sendiri jadi terancam dan merapuh. Kita harus tegas menolak laku reduksi atas Pancasila yang menjadikannya semata-mata sebagai “tongkat pengebuk” sebab reduksi yang demikian juga merupakan suatu pengkhianatan tersendiri. Pancasila tetaplah rangkaian ideal komprehensif yang harus terus dibina atau diwujudkan.

Ketiga ialah dengan memahami adanya simbiosis antara “nasion” dan “demokrasi” serta memahami imperatif otosentrisitas. Ini berarti kita harus menegakkan demokrasi sembari memuliakan nasion. Persaudaraan dalam pluralitas “nasion” akan diperkuat dengan pelaksanaan demokrasi, sedangkan kerja menyusun kontrak-kontrak politik dalam demokrasi dipermudah dengan mengindahkan persaudaraan se-“nasion”. Pemahaman akan simbiosis ini mutlak perlu bagi para penentu/pelaksana kebijakan di ketiga cabang pemerintahan maupun di setiap bagian Tanah Air dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keempat, memasuki wilayah praksis, yaitu dengan memisahkan urusan agama dengan urusan negara atau menjaga independensi keluhuran/kebijakan masing-masing. Ini bertujuan agar

keduanya tidak saling merusak, melainkan justru saling menunjang dalam independensi. Pencampur-adukan urusan agama dengan urusan negara akan merancukan integritas dan kompetensi masing-masing dan akhirnya akan merusak keduanya. Peradaban politik modern cukup banyak menyediakan rambu-rambu atau kiat-kiat untuk membuat agama dan negara tidak saling merusak, misalnya dengan mengangkat pejabat negara semata-mata menurut kriteria keutamaan jejak integritas dan kompetensi kenegaraannya.

Kelima, memanfaatkan momentum amandemen baru atas UUD 1945 serta perubahan undang-undang politik untuk memperkenalkan bab aturan peralihan guna mengatasi dalamnya dampak negatif dari pilihan-pilihan simalakama di bidang politik yang di awal EUR mestinya diatasi sekaligus lewat Konstitusi Transisional. Dengan memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan serta daya temu (*inventiveness*) politik/hukum yang ada pada bangsa kita, tidak mustahil kita mampu memperkecil atau bahkan meniadakan dampak negatif dari pilihan-pilihan simalakama tersebut.

Untuk memperkecil peluang korupsi dan politik uang, misalnya, kita bisa mempertimbangkan kemungkinan menetapkan dalam aturan peralihan agar para pejabat eksekutif tertinggi, terutama presiden, dipilih masing-masing hanya untuk satu masa jabatan dalam pemilihan umum dan pilkada katakanlah hingga 2014. Kita juga bisa memasukkan moratorium bagi otonomi daerah serta mencegah munculnya partai-partai oportunistis dengan mensyaratkan basis massa dan/atau basis ideologis yang belum diklaim oleh partai-partai yang sudah ada.

Terakhir, sedapat mungkin mengadopsi strategi Pergerakan Kemerdekaan kita, yaitu menarik garis pisah antara pihak sini dan pihak sana. Jika dulu kedua pihak ini dibedakan atas dasar bangsa penjajah atau bangsa terjajah, kini keduanya harus dibedakan atas dasar perilaku yang membina atau merusak nasion. Di luar wilayah abu-abu, tidaklah sulit mengidentifikasi para pelaku dan rangkaian perilaku khianat-nasion oleh individu maupun partai di sekitar kita sebagai bagian dari pihak sana, dan membandingkannya dengan rangkaian perilaku bela-nasion sebagai bagian dari pihak sini. Selanjutnya, pihak sini wajib menggalang dan

³⁰ Tentang genealogi nasion Indonesia, lihat misalnya Mochtar Pabottingi, *Nationalism and Egalitarianism in Indonesia, 1908-1980*. Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa, 1991 dan R.E. Elson, *The Idea of Indonesia: A History*, Cambridge University Press, 2008.

meningkatkan kerjasama serta jaringannya untuk menghadapi pihak sana.

Kristalisasi pihak sini-pihak sana sulit dielakkan dalam kondisi keterpurukan berkepanjangan yang sudah langsung mengancam eksistensi Republik kita. Ini perlu dilakukan mulai dari tingkat individu hingga ke tingkat partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Partai/organisasi dituntut untuk kembali menegaskan paradigma ideologis masing-masing dan mereka yang paradigmanya kurang-lebih sama seyogianya melebur diri. Partai yang semula bertolak sebagai kekuatan reformis namun kemudian terkontaminasi menjadi cetakan Orde Baru; menghadapi tugas berat untuk membersihkan diri.

Partai atau organisasi pejuang dengan landasan ideologis serta sistem pengaderan yang baik bisa menerapkan kebijakan *askese politik*, yaitu melarang tiap anggotanya hidup bermewah-mewah di tengah kemelaratan rakyat sebab bermewah-mewah di tengah kemelaratan rakyat adalah imoral dan sekaligus *suspicious*. Ia pun bisa secara sukarela mentradisikan asas pembuktian terbalik di lingkungannya atas setiap bentuk kekayaan yang asal-usulnya dipertanyakan. Kedua langkah ini akan berdampak sangat positif bagi kebangkitannya sebagai partai/organisasi pemimpin ke depan, baik untuk menjadi simpul-simpul kebijakan dan solidaritas publik, maupun untuk tumbuh menjadi partai/organisasi mayoritas.

Partai/organisasi yang solider dengan kondisi rakyat dan konsisten mengamalkan prinsip akuntabilitas serta transparansi akan segera bersambung dengan, lekat di hati, dan menjadi panutan rakyat. Di manapun dan kapanpun rakyat tak pernah terlalu bodoh untuk menyambung dirinya dengan tiap partai/organisasi yang konsisten membela dan mengangkat harkat hidupnya dengan kasih. Makin bajik suatu partai, makin besar pulalah peluangnya untuk memperkuat barisan dan memperluas pengaruhnya secara nasional. Maka sama seperti hasil dari strategi pihak sini-pihak sana di masa Pergerakan Nasional yang berujung pada Republik Indonesia, strategi pihak sini-pihak sana masa kini yang di permukaan tampak konfrontatif sesungguhnya tak lain dari strategi menuju reintegrasi nasional di atas dasar-dasar politik yang lebih bijak dan lebih kokoh.

Kesimpulan

Nasion, Republik, dan Tanah Air kita adalah tiga serangkai rahmat dan sekaligus amanah yang tiada ternilai harganya dari Yang Maha Pengasih kepada bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memahami berturut-turut politik dalam pengertiannya yang hakiki,
- 2) memahami cetak biru Republik kita,
- 3) memahami simbiosis antara nasion dan demokrasi yang bineka dalam moda otosentrisitas (atau yang membela dan memelihara segenap warganegara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun),
- 4) menghormati independensi serta saling tunjang negara dan agama terhadap dan bagi satu sama lain di dalam Republik,
- 5) menyiasati secara cerdas perangkap-perangkap atau pilihan-pilihan simalakama yang merubung kita lantaran anakronisme politik selama ini, dan
- 6) menarik garis pisah antara “pihak sini” dan “pihak sana” demi kebijakan publik dan reintegrasi nasional.

Semua itu adalah jalan yang sah, terpuji, dan tak terelakkan jika kita hendak menyediakan tanah yang gembur dan udara yang lapang bagi pertumbuhan pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa depan yang dekat.

Hanya pemimpin-pemimpin sejati yang sanggup menyelamatkan bukan hanya rangkaian agenda reformasi, melainkan juga dan terutama rangkaian cita-cita luhur yang terangkum di dalam Pancasila secara utuh. Jika keenam langkah di atas bisa kita hayati dan wujudkan akan tersambunglah kembali ikatan –tali pusar– yang menyatukan eksistensi kita dengan para pendiri Republik beserta jutaan rantai pejuang dan/atau syuhada yang sudah mendahului.

Alangkah indah dan bermakna hidup, berjuang, dan berkarya untuk menyediakan masa depan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih bermartabat bagi anak-cucu kita, generasi-generasi bangsa kita hingga jauh ke masa depan –membawa Indonesia berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa-bangsa termaju di dunia, bahkan jika bisa melampaui mereka semua. Dalam perenungan dan pergumulan pemikiran kita pada peringatan Satu Dekade Era Upaya Reformasi dan Satu Abad Pergerakan Kemerdekaan saat ini,

inilah jalan untuk memunculkan sosok yang lebih nyata dan lebih tegas bagi Kebangkitan Nasional kita seterusnya

Daftar Pustaka

- Basyar, M. Hamdan (Ed.). 2003. *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-Pola Alternatif Penyelesaiannya*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, Heru (Ed.). 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Jakarta: P2P-LIPI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Chinweizu. 1975. *The West and the Rest of Us*. New York: Random House.
- de Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*. Vol. 2.
- Diamond, Larry dan Leonardo Morlino. 2004. "The Quality of Democracy: An Overview". *Journal of Democracy*. Volume 15, No. 4, Oktober 2004.
- Diamond, Larry, Juan J. Linz, dan Seymour Martin Lipset (Eds.). 1988. *Democracy in Developing Countries*. (Volume Two: Africa). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Elson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elster, Jhon (Ed). 2003. *Deliberative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fanon, Frantz. 1968. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press Inc.
- Habibie, B.J. 2006. *Detik-Detik Yang Menentukan*. THC Mandiri.
- Haris, Syamsuddin, dan Riza Sihbudi (Eds.). 1995. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsuddin. 2007. "Dilema 'Salah Urus' Negara dan Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan", dalam Firman Noor (Ed.). *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordialisme di Indonesia*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Johnson, Chalmers. 2000. *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire*. New York: An Owl Book, Henry Holt and Company.
- Majalah Tempo. "Anarki Pemisahan Wilayah". 15 Februari 2009.
- McKeon, Richard (Ed.). 1947. *Introduction to Aristotle*. New York: The Modern Library.
- Memmi, Albert. 1965. *The Colonizer and the Colonized*. New York: The Orion Press.
- Pabottingi, Mochtar. 1991. *Nationalism and Egalitarianism in Indonesia, 1908-1980*. Doctoral Dissertation. Hawaii: University of Hawaii at Manoa.
- _____. 1994. "Demokrasi: Masalah Genealogi, Distorsi, dan Ototentrisitas". Seminar Nasional XI dan Kongres III AIPI bertema Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia, yang diselenggarakan melalui kerjasama antara AIPI dan PPW-LIPI. Jakarta, 25-27 Januari 1994
- _____. 2000. "Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Ototentrisitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia". Orasi Ilmiah, Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama, PPW-LIPI, 22 Juni 2000
- _____. 2001. "In the Absence of Autocentricity: The Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesia". Dalam R. William Liddle (Ed.). *Crafting Indonesian Democracy*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- _____. 2006. "UU No. 22 Tahun 1999: Blunder Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik". Dalam Syamsuddin Haris (Ed.). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- _____. 2007. "Pengukur Demokrasi Kita". Ditulis sebagai "Pengantar" bagi Syamsuddin Haris (Ed.). *Partai dan Parlemen Lokal: Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- _____. 2007. *Risiko Politik Divestasi Indosat*. Jakarta: Guci Offset Printing.
- _____. 2008. "Dalam Kutukan Anakronisme". Dalam *Tempo*. 1 Agustus 2008.
- Panikkar, K.M. 1969. *Asia and Western Dominance*. New York: Collier Books Edition.

- Parekh, Bhikhu. 1993. "The Cultural Particularity of Liberal Democracy". Dalam David Held (Ed.). *Prospects for Democracy*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Rossiter, Clinton (Ed.). 1961. *The Federalist Papers: Hamilton, Madison, Jay*. New York: A Mentor Book.
- Sartori, Giovanni. 1987. *The Theory of Democracy Revisited: Part One: The Contemporary Debate*. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc.
- Setiawan, Bayu (Ed.). 2004. *Konflik Poso: Perbedaan Intensitas Konflik dan Efektivitas Upaya Penyelesaiannya*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Shapiro, Ian. 2003. *The Moral Foundations of Politics*. New Haven: Yale University Press.
- Simpson, Peter L. Phillips. 1997. *The Politics of Aristotle*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Stanley. 2005. "Timbunan Sampah Orde Baru". Dalam Stanley (Ed.). *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablaskan Rezim Soeharto di Era Reformasi*. Jakarta: Institut Studi Arus Reformasi, Universitas Melbourne, Ausaid.
- Sunstein, Cass R. 2001. *Designing Democracy: What Constitutions Do?* Oxford: Oxford University Press
- Uhlen, Anders. 1997. *Oposisi Berserak*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Yanuarti, Sri, dkk. 2006. Problematika *Capacity Building* Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku. Jakarta: P2P-LIPI.